

**RISIKO DALAM ERA ANTROPOSEN:
PERSPEKTIF DAN AREA KAJIAN SOSIOLOGI**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Sosiologi
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
Pada 22 Februari 2022**

**Oleh
Prof. Dr. Suharko, M.Si.**

As-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
Salam sejahtera, Om swastiastu, Namó buddhaya, Salam kebajikan.

Yang saya hormati,
Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat;
Rektor dan para Wakil Rektor;
Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik;
Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar;
Para Dekan, Ketua Lembaga di Lingkungan UGM;
Segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada;
Para hadirin, tamu undangan yang berbahagia.

Perkenankan saya memulai pidato ini dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir, baik secara tatap muka di Balai Senat Universitas Gadjah Mada ini maupun hadir dalam ruang virtual melalui gawai masing-masing.

Sebuah peringatan dan sekaligus judul buku *the World at Risk* (Beck, 2009), mendapat gambaran paling terang pada malapetaka (*catastrophe*) pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Dunia dicekam oleh ancaman mengerikan (*monstrous threat*) terhadap kemanusiaan (Zinn, 2020) yang muncul dari makhluk super mikro yang tidak kasat mata, tetapi mampu memorak-porandakan hampir seluruh tatanan kehidupan global. Semua warga dunia menghadapi risiko terpapar Covid-19, tidak peduli apa pun pengelompokan sosialnya.

Secara medis, kita dituntut untuk selalu waspada dan hati-hati terhadap ancaman yang tidak kasat mata ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Namun, berbagai aktivitas keseharian masih saja diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Pada titik itulah, kita merasa berada dalam kondisi yang tidak pasti (*uncertainty*) karena probabilitas tertular Covid-19 dan kemungkinan besaran dampaknya. Risiko dan ketidakpastian yang hadir dan menjadi bagian dari keseharian kita pada masa pandemi telah mendorong saya untuk menulis dan menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang berjudul: **Risiko dalam Era Antroposen: Perspektif dan Area Kajian Sosiologi.**

Hadirin yang saya hormati,

Mengapa Sosiologi Mengkaji Isu Risiko?

Ada dua alasan pokok. Alasan yang pertama adalah konteks dan lingkungan fisik, spasial, serta sosial yang terus berubah secara cepat dan tidak terduga sebagaimana tampak dari pandemi dalam dua tahun terakhir ini.

Perubahan-perubahan sosial secara cepat sebenarnya sudah terjadi sejak Revolusi Industri pada abad ke-18 ketika bumi telah meninggalkan era “*Holocene*” dan memasuki periode geologis baru yang dicirikan oleh efek serius dari aktivitas “*anthropic*”, yang disebut era Antroposen (*Anthropocene*) (Crutzen & Stoermer, 2000).

Istilah antroposen secara luas digunakan dan diperdebatkan oleh para ahli dan peneliti dari berbagai disiplin keilmuan. Secara umum, istilah antroposen sering kali digunakan untuk merujuk pada gejala ancaman kerusakan, dampak dan risiko lingkungan, serta kerentanan yang timbul sebagai implikasi dari aktivitas manusia, seperti tampak pada deforestasi, hilangnya keragaman hayati, naiknya permukaan air laut di berbagai negara dan wilayah, serta gejala kerusakan dan pengikisan sumber daya alam lainnya (Jobin et al., 2021). Singkatnya, penduduk bumi yang kini telah mencapai 7,5 miliar lebih semakin menampakkan diri sebagai penguasa dan penentu kerusakan di bumi ini. Tema Hari Bumi tahun 2021, yaitu “Pulihkan Bumi Kita” (*Restore Our Earth*), mengukuhkan tren tersebut.

Malapetaka Covid-19 mengonfirmasi bahwa kita sesungguhnya telah berada dalam era Antroposen ini. *United Nations Environment Programme/UNEP* (2016) pernah memperingatkan tentang kemungkinan munculnya pandemi yang diakibatkan oleh meningkatnya gejala zoonosis (*zoonoses*), yakni penyakit yang muncul melalui penularan dari hewan ke manusia. Penyakit *zoonotic* terkait erat dengan kesehatan ekosistem. Risiko munculnya penyakit ini meningkat sejalan interaksi manusia dengan alam yang makin intens. Kemudahan mobilitas telah mendorong warga bepergian ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah-wilayah terpencil dan alam liar. Hal itu membuka pintu pertemuan dan lompatan patogen dari hewan ke manusia. Semua itu menegaskan bahwa aktivitas pembangunan dan mobilitas manusia sering mengeksploitasi alam dan lingkungan hidup yang dapat

menimbulkan risiko pada kesehatan masyarakat secara luas (Foster & Suwandi, 2020).

Risiko lingkungan yang muncul dari perilaku manusia ini juga makin terkonfirmasi melalui survei *World Economic Forum/WEF* (2021) yang menyebutkan bahwa tiga risiko tertinggi yang mungkin terjadi dalam sepuluh tahun ke depan adalah cuaca ekstrem, kegagalan dalam mengatasi iklim, dan kerusakan lingkungan yang bersumber dari perilaku manusia. Hal senada pada risiko tertinggi berdasarkan dampak dalam sepuluh tahun mendatang ialah penyakit menular yang diikuti oleh kegagalan mengatasi perubahan iklim dan risiko lingkungan lain.

Isu-isu apokaliptik menandai era Antroposen di Indonesia. Kota Jakarta diramalkan menjadi kota pertama di dunia yang akan tenggelam karena dampak perubahan iklim (Guest, 2019). Akibatnya, warga kota Jakarta harus menghadapi risiko yang makin serius pada masa depan (Colven, 2020; Chandler, 2017; Firman et al., 2011). Ancaman tenggelam juga terjadi di sejumlah wilayah pantai utara pulau Jawa, seperti Bekasi, Pekalongan, Semarang, Demak, dan Gresik (Watchdoc, 2020). Sebuah simulasi dan proyeksi berdasarkan data dari Climate Central memperkirakan sejumlah 199 kabupaten/kota di Indonesia akan tergenang air laut pada tahun 2050 yang mencakup wilayah seluas 118.000 hektare dan berdampak pada 8,6 juta warga (Rosalina et al., 2021). Singkatnya, bahaya, ancaman, dan dampak krisis iklim global telah hadir meskipun kurang disadari karena prosesnya berjalan secara perlahan.

Pada level nasional dan lokal, berbagai bentuk risiko lingkungan muncul dan terjadi seiring dengan akselerasi proyek-proyek pembangunan yang bercirikan neoliberal, terutama sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono yang mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Meskipun berganti nama, semangat dan tujuan percepatan pembangunan tersebut dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2014 hingga sekarang melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Melalui MP3EI dan PSN, pemerintah berupaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur. Proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi dipercepat

realisasinya. Upaya ini didukung oleh payung regulasi yang mengatur mekanisme dan percepatan realisasi PSN yang kemudian disatukan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Risiko lingkungan dan sosial muncul dari rencana dan implementasi berbagai proyek pembangunan dalam kerangka MP3EI dan PSN. Risiko ini terutama dihadapi oleh warga yang tinggal di sekitar area proyek. Kerusakan ekologis terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi koridor ekonomi dan kawasan industri (Rachman & Yanuardy, 2014; Walhi, 2021; 2020).

Pulau Jawa, terutama wilayah pantai utara yang mengalami pembangunan infrastruktur dan kawasan industri yang pesat dan masif, telah menghadirkan dengan jelas bentuk-bentuk risiko yang dihadapi warga, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, bencana lingkungan, kecelakaan industri, ancaman hilangnya ruang hidup, ancaman hilangnya pekerjaan, perubahan pola penghidupan, serta penurunan pendapatan karena perubahan ekosistem (Watchdoc, 2021). Risiko dan dampak lingkungan dan sosial menjadi alasan pokok bagi warga lokal yang umumnya berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk melakukan penolakan dan perlawanan terhadap implementasi berbagai proyek pembangunan seperti tampak dari pembangunan pabrik semen di Rembang (Candraningrum, 2014) dan Pati (Asrawijaya & Hudayana, 2021; Suharko, 2016), pembangunan Bendungan Bener di Purworejo (Nuswantoro, 2018), serta proyek-proyek pembangunan lainnya yang mengubah fungsi lingkungan dan mengancam pola penghidupan warga (Hudayana et al., 2020).

Berbagai bentuk risiko yang muncul sebagai konsekuensi dari pandemi, krisis iklim, dan akselerasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur memiliki sumber penyebab yang kurang lebih sama, yakni intervensi manusia terhadap alam dan lingkungan hidup dalam berbagai bentuk perilaku individual dan kolektif serta mekanisme kelembagaan modern-industrial.

Hadirin yang saya muliakan,

Alasan yang kedua, dalam konteks era Antroposen ini, sosiologi harus berdialog dengan berbagai disiplin keilmuan lain untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan tentang risiko sebagai

konsep yang multidimensional dan harus dikaji secara multidisiplin, bahkan transdisiplin.

Dalam beberapa dekade terakhir, manajemen risiko telah dipraktikkan secara intens, bukan hanya pada urusan yang berkaitan dengan aktivitas industrial, tetapi juga telah meluas ke berbagai bidang, seperti lingkungan hidup, kesehatan, makanan, dan transportasi. Manajemen risiko tidak lagi hanya berkaitan dengan sektor dengan risiko spesifik dan tinggi, seperti operasi pembangkit listrik tenaga nuklir, industri kimia, dan transportasi umum, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari mekanisme kerja organisasional. Semua organisasi di seluruh sektor (perusahaan, badan pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis kepentingan) harus berurusan dengan risiko dan menjadikan manajemen risiko sebagai pertimbangan penting dalam kegiatan-kegiatan mereka (Lidskog & Sundqvist, 2013).

Banyak individu mulai membiasakan diri untuk memasukkan gagasan tentang risiko ketika mengorganisasikan kehidupan sosialnya. Bentuk-bentuk pengorganisasian sosial seperti negara, struktur keluarga tradisional, komunitas, dan bentuk-bentuk pengelolaan kehidupan bersama lainnya, yang biasanya digunakan untuk memetakan masa depan, telah dan sedang melemah atau terkikis, serta individu pun harus menavigasi hidup mereka tanpa semua itu (Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Individu dihadapkan pada tantangan tentang bagaimana mengorganisasi kehidupan sosial serta kepada siapa dan pada apa kita harus percaya dalam dunia yang serba tidak menentu. Masyarakat tidak punya pilihan lain selain mengorganisasi diri mereka sendiri untuk menghadapi risiko. Menilai, mengelola, dan mengomunikasikan risiko adalah industri yang sesungguhnya (Lidskog et al., 2005).

Perkembangan pesat kajian risiko yang (sebelumnya) dikaitkan dengan aktivitas industrial ke risiko yang dihubungkan dengan perilaku individu dan organisasi merupakan seruan kuat untuk hadirnya analisis sosiologis. Pada titik ini, sosiologi harus membuka dialog dengan berbagai disiplin keilmuan lain yang mempelajari risiko serta mengembangkan analisis dan manajemen risiko. Tidak ada jawaban final dari pertanyaan tentang bagaimana berurusan dengan risiko (*to deal with risk*) dan mungkin memang tidak akan ada jawaban untuk itu.

Namun demikian, terdapat konsensus bahwa risiko harus didekati dari perspektif yang beragam oleh berbagai bidang keilmuan, dari matematika, ilmu alam, psikologi, ekonomi, sosiologi, studi budaya, hingga filsafat (Roeser et al., 2012). Risiko adalah isu kajian yang relatif baru dalam sosiologi meski tumbuh pesat dalam tiga dekade terakhir dan belum sepenuhnya dilembagakan sebagai suatu sub-kajian (Lidskog & Sundqvist, 2013).

Hadirin yang berbahagia,

Perspektif Sosiologi tentang Risiko

Tidak ada definisi tunggal tentang risiko. Namun, ada asumsi umum yang dirujuk oleh semua pendekatan risiko, yakni perbedaan antara realitas dan probabilitas. Sepanjang masa depan dipahami sebagai sudah ditetapkan, tidak bisa diubah, dan bebas dari campur tangan manusia maka istilah risiko tidak punya makna apa pun. Konsep risiko berkaitan dengan probabilitas bahwa masa depan dapat diubah (atau dipersepsikan dapat diubah) melalui aktivitas manusia. Dipahami dengan cara demikian, dalam diskusi interdisiplin, risiko sama dengan bahaya (*hazard*), kerugian (*loss*), atau kerusakan/ancaman (*damage/threat*). Semua itu mengindikasikan kejadian yang tidak diinginkan (*unwanted events*). Dari cara pandang ini, risiko adalah probabilitas dari suatu kejadian bahaya tertentu dan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan (Zinn, 2006).

Pada umumnya, sosiologi menempatkan isu risiko sebagai konsekuensi dari modernisasi lanjut yang dihasilkan oleh industrialisasi yang berlangsung sejak abad ke-18 atau akhir-akhir ini sering disebut Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0. Dalam modernisasi lanjut, produksi kekayaan secara sistematis disertai oleh produksi risiko. Problem dan konflik yang timbul dari distribusi kekayaan yang tidak merata kemudian bertumpang-tindih dengan masalah yang muncul dari produksi, definisi, dan distribusi risiko yang dihasilkan secara tekno-ilmiah. Inilah yang disebut sebagai masyarakat risiko (*risk society*) (Beck, 1992) yang merujuk pada era di mana kesadaran risiko menjadi cara berpikir yang dominan dalam menanggapi berbagai masalah mendesak dan potensial. Masalah ini terutama muncul sebagai efek dari perkembangan patologis dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang

pada titik tertentu, potensi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Risiko dan bahaya lebih meluas dan serius. Masyarakat lebih sering mengalami berbagai malapetaka global. Risiko yang ditimbulkan telah melampaui batas-batas ruang dan waktu dan akibatnya tidak dapat lagi dilihat sebagai efek samping yang bersifat laten yang menimpa suatu lokalitas atau kelompok tertentu. Ringkasnya, risiko adalah ciri yang melekat pada semua aktivitas masyarakat global saat ini (Giddens, 1990), sekaligus bahaya yang inheren dalam masyarakat risiko industrial (*industrial risk society*) yang ditandai oleh bekerjanya modernisasi refleksif (*reflexive modernization*) (Beck, 1995).

Risiko adalah “suatu cara sistematis dalam menghadapi bahaya dan ketidakamanan yang timbul karena modernisasi itu sendiri” (Beck 1992:21). Senada dengan itu, risiko merujuk pada “bahaya yang dinilai secara aktif dalam kaitannya dengan kemungkinan di masa depan” (Giddens, 2002:74). Risiko berbeda dari bahaya. Risiko adalah akibat yang dapat dikontrol, sedangkan bahaya adalah akibat yang tidak dapat dikontrol (Beck, 1992). Bahaya perlu dihindari, tetapi risiko tidak perlu ditakuti; itulah mungkin siasat dalam masyarakat risiko.

Terdapat dua tipe risiko, yaitu risiko eksternal dan risiko buatan. Risiko eksternal (*external risk*) atau risiko lama (*old risk*) adalah risiko yang dialami karena datang dari luar, baik dari keterikatan dengan tradisi maupun dari alam, seperti gempa, tsunami, badai, dan erupsi gunung berapi. Risiko buatan (*manufactured risk*) atau risiko baru (*new risk*) ialah risiko yang diciptakan oleh dampak pengembangan pengetahuan terhadap dunia, seperti rekayasa genetik, teknologi nuklir, dan rekayasa industri kimiawi. Termasuk dalam risiko buatan adalah sebagian besar risiko lingkungan (*environmental risk*) yang muncul akibat pemanasan global dan perubahan iklim (Giddens, 2002; 2009). Risiko juga muncul dari krisis finansial dan terorisme (serangan bom bunuh diri) yang secara langsung dipengaruhi oleh globalisasi yang semakin intensif (Beck, 2009).

Risiko buatan lebih dominan dalam era masyarakat industrial lanjut dan mencerminkan gejala paradoks modernitas. Di satu sisi, prinsip modernitas berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi institusi-institusi modernitas tidak mampu mengelola implikasi-implikasi yang ditimbulkannya (Beck, 2009). Masalah ekologis

(pemanasan global dan perubahan iklim) bersumber pertama-tama bukan dari luar, tetapi muncul dari dalam institusi masyarakat itu sendiri. Institusi masyarakat tidak mampu mengendalikan industri untuk tidak menghasilkan bahaya-bahaya yang mengancam lingkungan. Oleh karena itu, klaim teoretis bahwa kita sekarang hidup dalam masyarakat risiko dan dalam suatu iklim sosial yang mengukuhkan ketidakamanan, ketakutan, dan risiko (Giddens, 1990; 2002; Bauman, 2006; Furedi, 2008) menjadi semakin sulit dibantah.

Perspektif masyarakat risiko mendasarkan pada pemahaman bahwa risiko dikonstruksi secara sosial dan sekaligus sesuatu yang objektif sehingga bisa disebut sebagai pendekatan realis yang kritis (*critical realist*). Pendekatan ini berbeda dari pendekatan realis yang dimiliki oleh disiplin keilmuan sains yang memandang risiko sebagai suatu entitas yang memiliki keberadaan objektif dan dapat diakses secara langsung; juga berbeda dari pendekatan kultural yang melihat penafsiran terhadap risiko objektif sebagai diperantarai oleh faktor-faktor sosial (Zinn, 2008).

Dalam upaya membangun teorisasi risiko, sejumlah pendekatan lain telah melengkapi dan bahkan berkontestasi dengan pendekatan masyarakat risiko. Secara ringkas, saya sampaikan dua pendekatan lain yang lebih berciri konstruktivis.

Pendekatan teori sistem menempatkan risiko sebagai bagian inheren dari masyarakat yang terdiferensiasi secara fungsional. Berbeda dengan perspektif masyarakat risiko, teori sistem tidak melihat risiko sebagai akibat dari masyarakat industri. Risiko berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dapat mengakibatkan konsekuensi negatif. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan suatu situasi yang mencakup sejumlah besar kemungkinan (kontingensi) dan sayangnya tidak ada rujukan dasar atau otoritas yang bisa memberi tahu kemungkinan yang sebaiknya dipilih di antara berbagai alternatif. Dalam teori sistem, setiap subsistem memiliki tatanan internal yang bersifat merujuk pada dirinya sendiri dan *auto poetic* sehingga tidak ada pengaruh dari faktor eksternal. Keputusan harus dibuat tanpa kepastian tentang konsekuensi apa yang akan ditimbulkan. Penyebab kerusakan dapat berasal dari sistem itu sendiri (risiko) atau dari di luar sistem (bahaya) (Luhmann et al., 2002).

Pendekatan *governmentality* mengonseptualkan risiko sebagai bagian dari teknik khusus untuk mengatur masyarakat (Foucault, 1991). *Governmentality* adalah pembentukan realitas sosial melalui wacana dan teknik praktis yang kemudian memandu bagaimana memahami realitas sosial dan tindakan yang masuk akal. Meskipun ada wacana yang berkembang dinamis, strategi pengaturan cukup praktis dalam hal aturan, pemasangan teknologi pengawasan, pemaksaan langsung, dan hukuman. Oleh karena itu, risiko merupakan teknologi sosial untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan teknik perhitungan probabilitas seperti diterapkan dalam asuransi atau dalam teknik lain untuk mempersiapkan masa depan. Menurut pendekatan ini, risiko sebenarnya tidak ada dalam kenyataan. Namun demikian, apa pun bisa menjadi risiko, tergantung pada bagaimana seseorang menganalisis bahaya dan mempertimbangkannya. Risiko dipahami bukan sebagai bahaya, tetapi sebagai cara khusus untuk mengelola ancaman dengan bantuan teknologi kalkulatif (Ewald, 1991; Garland, 2003).

Hadirin yang saya muliakan,

Agenda-agenda Kajian

Dihadapkan pada, di satu sisi bentuk risiko yang makin beragam, frekuensi yang makin bertambah, intensitas yang makin tinggi, dan skalanya yang bersifat global, dan di sisi lain, keragaman perspektif tentang risiko yang makin berkembang, setidaknya tiga isu kajian bisa diagendakan.

Keadilan dan Gerakan Lingkungan

Isu keadilan lingkungan (*environmental justice*) pada awalnya muncul di Amerika Serikat karena risiko yang timbul akibat pembuangan limbah industri terdistribusi secara tidak merata dan tidak terkelola dengan baik sehingga berdampak buruk pada warga minoritas yang umumnya miskin. Gejala ini sering disebut juga sebagai rasisme lingkungan (*environmental racism*) (Bullard, 1993). Isu keadilan kemudian dikaitkan dengan hak komunitas dan individu untuk tidak menderita dari dampak dan risiko lingkungan.

Pada awalnya, keadilan lingkungan menekankan pada isu ekuitas, yakni distribusi risiko dan manfaat yang setara. Namun, dalam

perkembangannya, keadilan lingkungan memasukkan dimensi rekognisi, partisipasi, dan kapabilitas. Rekognisi berkaitan dengan pengakuan dan penghargaan pada semua kelompok sosial yang terlibat dalam aktivitas pembangunan, terutama kelompok minoritas, masyarakat adat, dan kategori-kategori kelompok marginal lainnya. Hanya dengan rekognisi, semua kelompok sosial akan melibatkan diri dalam proses politik untuk merancang dan melaksanakan berbagai bentuk pembangunan yang menimbulkan risiko lingkungan. Pada gilirannya, praktik-praktik dari dimensi ekuitas, rekognisi, dan partisipasi akan mengantarkan pada kapabilitas manusia yang meningkat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan (*wellbeing*) (Schlosberg, 2004; Schlosberg & Collins, 2014).

Keempat dimensi keadilan lingkungan ini saling berkaitan dan menjadi acuan dalam berbagai bentuk perlawanan terhadap gejala dan praktik ketidakadilan lingkungan di AS serta di negara-negara Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Keadilan lingkungan telah menjadi platform dari aktivisme dan gerakan perlawanan yang disebut gerakan keadilan lingkungan (*environmental justice movement*) (Martinez-Alier, 2014; Suharko, 2020). Dalam perkembangannya, keadilan lingkungan menjadi semacam “payung” dari berbagai bentuk gerakan dengan isu spesifik, seperti keadilan pangan, keadilan air, keadilan iklim (Sikor & Newel, 2014), dan bahkan keadilan intergenerasional (Meyer, 2017; Tremmel, 2009).

Saat ini, para akademisi telah menggunakan keadilan lingkungan sebagai model baru analisis (*a new form of analysis*) terhadap interseksi antara isu risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Para aktivis gerakan lingkungan pun tampak menjadikan isu keadilan lingkungan sebagai rujukan nilai dan sekaligus orientasi gerakan. Pada titik ini, keadilan lingkungan telah berkembang menjadi pijakan bersama (*common platform*) dalam mendiskusikan prakarsa, praktik pengelolaan, dan gerakan lingkungan (Sikor & Newell, 2014).

Sekadar contoh, dari analisis awal, keadilan lingkungan sebagai platform bersama tampak dari kasus perlawanan warga terhadap pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo. Di satu sisi, proyek ini akan membawa manfaat yang besar dan penting untuk penyediaan air irigasi, dukungan pada sektor pertanian dan ketahanan

pangan, cadangan dan pasokan air bersih, serta manfaat publik lainnya. Namun, di sisi lain, proyek ini juga telah memunculkan risiko bagi warga Desa Wadas yang lahan penghidupannya terancam oleh (rencana) pengambilan material *urug* dari penambangan terbuka (*quarry*) sebagai bagian dari proyek pembangunan bendungan. Proyek tersebut telah menjadi sumber risiko yang membayangi kehidupan warga Wadas dan telah mendorong mereka untuk melawan dengan dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan para akademisi (Watchdoc, 2021; Kusuma, 2021).

Keadilan lingkungan semestinya menjadi platform yang mendasari landasan legal-formal dan kebijakan penanganan risiko dan dampak dari pembangunan. Indonesia bisa mengambil rujukan dari Filipina yang sudah menempatkan keadilan lingkungan sebagai bagian dari kebijakan negara (UNDP, 2014). Berdasar alasan ini, kelompok warga yang mengalami ketidakadilan lingkungan bisa menuntut ke lembaga pengadilan. Berbagai bentuk proyek pembangunan untuk kepentingan umum tidak seharusnya mengorbankan kehidupan dan penghidupan warga setempat dan kelompok-kelompok marginal. Aspek distribusi risiko, partisipasi kewargaan, rekognisi terhadap warga, dan kapabilitas warga sudah saatnya menjadi pijakan dasar dalam setiap aspek legal-formal dan kebijakan lain yang terkait dengan penanganan risiko dan dampak dari berbagai proyek pembangunan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT), dan instrumen kebijakan lain yang terkait dengan tindakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perwujudan keadilan lingkungan, baik dalam kebijakan publik maupun dalam pelaksanaan pembangunan, akan memberikan jaminan bagi keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri dan sekaligus keberlanjutan dari kehidupan dan penghidupan warga masyarakat.

Kerentanan dan Resiliensi

Isu kajian tentang kerentanan berkembang dalam sosiologi seiring dengan kajian tentang risiko yang makin mapan. Proliferasi gagasan tentang kerentanan tampak mencerminkan kepedulian risiko (*sense of risk*) yang baru (Misztal, 2011). Kedua isu ini sulit dipilahkan

karena sering hadir bersamaan atau beriringan. Kerentanan dan risiko adalah dua sisi dari koin yang sama (Beck, 2009).

Ketika risiko benar-benar mewujud dalam malapetaka maka kerentanan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Risiko penularan zoonosis telah terjadi dalam bentuk pandemi Covid-19. Meskipun semua orang mengalami ancaman dan rentan tertular, pada awalnya mereka yang rentan adalah tenaga kesehatan, orang dengan komorbid, dan orang lanjut usia. Dalam perkembangannya, kelompok yang rentan tersebut bertambah dan berubah secara dinamis. Kelompok yang pada awalnya tidak rentan bisa menjadi rentan karena implikasi dari kebijakan-kebijakan pembatasan sosial yang mendisrupsi aktivitas perekonomian. Akibatnya, banyak warga yang kehilangan sumber pendapatan secara mendadak dan banyak warga yang kurang bahkan tidak mendapat pelayanan kesehatan dan dukungan sosial yang memadai (Faruk et al., 2021).

Kerentanan biasanya dikaitkan dengan kondisi yang timbul dari keterpaparan terhadap krisis, tekanan, dan guncangan, kapasitas yang tidak memadai dalam mengatasinya, serta konsekuensi buruk yang menyertainya (Chambers, 2006:33; Watts & Bohle, 1993). Pengertian ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menemukan siapa yang sebenarnya paling rentan ketika suatu risiko mewujud dalam malapetaka, seperti pandemi, krisis iklim, dan bentuk-bentuk bencana lainnya. Dalam kaitan dengan analisis tentang kelompok rentan, sebenarnya perlu diidentifikasi kelompok mana yang sebenarnya paling rentan. Dalam konteks pandemi dan krisis iklim, misalnya, kelompok rentan perlu dilihat dari berbagai lapis, seperti dimensi gender, usia, kemampuan fisik, kelas sosial, etnisitas, ruang spasial, kewargaan, dan bahkan mungkin kesehatan mental. Pada titik inilah kemudian pendekatan interseksionalitas (*intersectionality*) relevan dikembangkan dalam kajian tentang kerentanan (Kadetz & Mock, 2018; Oloffson et al., 2016; Aini & Itriayati, 2021).

Kemampuan analisis untuk menemukan kelompok yang paling rentan akan memudahkan dalam upaya-upaya membangun resiliensi untuk menghadapi kerentanan. Dalam upaya-upaya mengatasi kondisi kerentanan, para pihak (misalnya, negara, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil) harus menilai kelompok warga

yang rentan dan yang paling rentan sehingga mampu memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi yang memadai. Upaya mengatasi kerentanan juga semestinya mencakup penguatan terhadap tiga kapasitas yang melekat pada kelompok atau komunitas rentan dan sistem yang melindunginya, yakni kapasitas absorptif, adaptif, dan transformatif (Bene et al., 2012). Penguatan terhadap tiga kapasitas tersebut akan menentukan suatu entitas yang terpapar krisis, tekanan, dan guncangan mampu bangkit kembali dengan lebih baik.

Pengarusutamaan Isu Risiko dan Kewargaan

Upaya-upaya mengarus-utamakan (*mainstreaming*) gagasan tentang risiko, baik dalam kehidupan individual maupun (terlebih) kehidupan publik, merupakan hal penting dan urgen bagi masyarakat dan negara-negara selatan seperti Indonesia. Pemikiran, bentuk-bentuk respons, dan manajemen risiko telah menjadi bagian inheren dari warga masyarakat dan negara-negara maju-industrial di belahan bumi utara. Dalam konteks Indonesia, meskipun berbagai bentuk risiko eksternal dan buatan telah bisa dikenali, upaya-upaya untuk mengarus-utamakan dalam tata kelola dan manajemen risiko masih harus diperkuat sehingga menjadi bagian inheren dalam kehidupan keseharian dan publik. Pemerintah terutama melalui BNPB dan berbagai OMS peduli bencana telah mengarus-utamakan “pengurangan risiko bencana” (*disaster risk reduction*) melalui berbagai aktivitas terkait penanganan bencana. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas risiko serta meluasnya sebaran wilayah dan warga yang terdampak, pengurangan risiko bencana sebagai strategi penting dalam mengelola semua potensi ancaman bencana harus terus dikembangkan dan diperkuat (Paton & Sagala, 2018).

Bentuk-bentuk bencana yang merupakan perwujudan dari risiko buatan, terutama berbagai bentuk bencana sebagai dampak krisis iklim global atau bencana hidrometeorologi (istilah yang digunakan oleh BNPB), perlu mendapatkan fokus perhatian melalui respons kebijakan yang memadai. Ancaman terendam oleh naiknya permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah pantai utara Jawa, misalnya, semakin nyata dan telah menimbulkan penurunan kualitas kehidupan warga yang tinggal di sana. Hal yang kurang lebih sama juga

mengancam kelompok petani (padi, sayuran, buah-buahan), petambak, nelayan, dan warga lain yang sumber penghidupannya sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi iklim. Bentuk-bentuk respons kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut masih kurang memadai dan harus diperkuat. Oleh karena itu, risiko perlu menjadi basis rujukan bagi negara dalam merancang dan melaksanakan berbagai bentuk kebijakan lingkungan dan kebijakan sosial, terutama bagi kelompok masyarakat marginal dan rentan terhadap ancaman dan dampak dari berbagai malapetaka dan bencana. Pendekatan ekologis dalam menyusun kebijakan sosial (Hoff & McNutt, 2009) tampaknya semakin relevan ketika risiko dan kerentanan akibat krisis iklim global semakin sering terjadi dan menimpa berbagai kelompok masyarakat.

Pengarusutamaan gagasan tentang risiko merupakan bagian dari penguatan kesadaran dan tindakan, dan perjuangan kewargaan (*citizenship*) (Berenschot & Van Klinken, 2019). Tidak semua warga yang menghadapi berbagai risiko dan ancaman memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa sebagai warga negara mereka memiliki hak atas hidup dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Warga yang terlibat dalam aksi kolektif menentang proyek-proyek PSN (dan sebelumnya MP3EI) menunjukkan bahwa mereka menghadapi berbagai risiko serius, seperti risiko kehilangan lahan garapan, kehilangan sumber penghidupan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan. Aksi kolektif warga perlu dipahami sebagai bagian dari suara warga yang hak hidup dan hak-hak kewargaan lainnya terancam. Mereka juga menempuh mekanisme legal untuk menuntut hak-hak kewargaannya. Tidak berlebihan jika warga masyarakat yang menuntut hak melakukan protes sosial dan melibatkan diri dalam gerakan menentang berbagai proyek pembangunan, mendapatkan pendampingan dan advokasi dari berbagai OMS, akademisi, dan aktivis sosial lainnya. Aksi-aksi kolektif warga yang menuntut hak-hak kewargaannya sudah semestinya mendapatkan respons kebijakan lingkungan hidup dan kebijakan sosial yang memadai sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan jaminan atas hak-hak warga negara secara inklusif.

Tiga area kajian di depan terutama berhubungan dengan risiko yang bersumber dari pandemi, perubahan iklim global, dan perubahan lingkungan atau ekologis lainnya. Risiko yang bersumber dari

perubahan-perubahan cepat dan disruptif dari revolusi digital akhir-akhir ini belum tercakup dalam naskah ini. Oleh karena itu, selain tiga area kajian tersebut, banyak isu lain perlu dikembangkan dalam kaitannya dengan risiko, seperti tata kelola risiko, kepercayaan publik terhadap para ahli dan ilmu pengetahuan, demokrasi dan risiko, *governmentality* risiko dan ketidakpastian, pengetahuan dan kearifan lokal tentang risiko, dan isu-isu lain yang berkembang dalam setiap perspektif teori, sumber, dan tempatan risiko.

Hadirin yang saya hormati,

Catatan Penutup

Isu risiko adalah interseksi di antara berbagai isu, seperti kerentanan, resiliensi, keadilan lingkungan, gerakan lingkungan, dampak dan tata kelola lingkungan, kewargaan, perlindungan dan kebijakan sosial, serta isu menonjol lain yang mencuat pada era Antroposen dan perubahan sosial yang cepat, yang juga menjadi perhatian dari berbagai disiplin keilmuan. Oleh karena itu, dengan membawa isu risiko ke ajang diskusi, perdebatan, pengajaran, dan riset, saya berharap bahwa sosiologi tidak hanya mampu mengaitkan problem risiko dengan konteks perubahan masyarakat global yang cepat, tetapi juga membangun dialog dengan berbagai disiplin keilmuan lain untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan berkontribusi dalam produksi pengetahuan perihal isu tersebut. Pada titik simpul inilah, saya telah memulai dan akan terus menjadikannya sebagai agenda-agenda akademik ke depan dengan berupaya mengintegrasikan dalam aktivitas riset dan publikasi, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebelum memungkasi pidato, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu per satu, yang telah memungkinkan saya berdiri di podium ini, di hadapan hadirin yang mulia.

Ucapan dan penghargaan yang pertama saya sampaikan kepada Kemendikbud Ristek yang telah memberikan amanah untuk menyandang jabatan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi. Ucapan terima kasih saya sampaikan pada Rektor, Dewan Guru Besar, dan Senat Akademik UGM yang telah mengusulkan dan menyetujui

saya untuk menduduki jabatan akademik ini. Kepada Wakil Rektor bidang SDMA dan jajaran di Direktorat SDM, saya sampaikan terima kasih atas semua fasilitas dan dukungan dalam mengawal proses administratif di UGM dan di Dirjen Dikti. Terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Ketua dan anggota Senat Fakultas Isipol, para Guru Besar Fisipol UGM, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Isipol, dan Ketua Departemen Sosiologi yang selalu memberikan dorongan, dukungan, dan persetujuan usulan jabatan akademik saya. Saya sampaikan terima kasih kepada semua tenaga kependidikan dan staf pendukung di Fisipol UGM yang telah menghadirkan suasana kerja dan pelayanan yang ramah, terutama tim kepegawaian yang selalu membantu aspek teknis pengusulan kenaikan jabatan.

Saya sangat beruntung dan bersyukur telah mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari seluruh guru-guru saya. Kepada seluruh guru saya di SDN Kebonrejo, SMPN 3 Wates, dan SMAN 1 Wates, Kulon Progo, terima kasih telah mengajarkan ilmu dan kebajikan sejak usia anak-anak hingga dewasa. Saya sampaikan terima kasih kepada pembimbing saya saat menempuh pendidikan sarjana, Prof. Nasikun (alm.) dan program pascasarjana UGM, Prof. Lukman Sutrisno (alm.). Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Prof. Hirotsune Kimura yang menjadi promotor saat menempuh pendidikan doctoral di Nagoya University, Jepang.

Dalam menjalankan dan mengembangkan karier sebagai dosen, saya mendapatkan dukungan dari para senior dan rekan dosen di Fisipol dan terutama di Departemen Sosiologi. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para senior sekaligus guru-guru saya: Prof. Soedjito (alm.), Pak Soenjoto, Pak Rahardjo, Bu Watik, Bu Sumarah, Prof. Partini, Prof. Sunyoto Usman, Prof. Tadjuddin, Pak Purwanto (alm.), Pak Andreas, Pak Prapto, Prof. Heru Nugroho, Pak Harman, Pak Lambang. Kepada para rekan dosen: Mas Praja, Mas Najib, Mas Dodi, Mas Jito, Mas Derajad, Mbak Amel, Mbak Tia, Mbak Fina, Mbak Nurul, Mas Hakim, Mbak Dewi, Mbak Desi, Mas Oki, Mas Abe, Mas Vicky, Mbak Wahyu, Mbak Ayu, Mas Falik, Mas Fuji, Mas Sidiq, Mas Zaki, Mas Ragil, dan Bung Dana (alm.), terima kasih atas persahabatan dan semangat kolegialitasnya. Ucapan terima kasih juga

saya sampaikan kepada seluruh staf administrasi dan staf pendukung di Departemen Sosiologi yang telah mendukung pekerjaan saya sebagai dosen dan pengurus departemen dan prodi.

Dalam menjalankan darma riset dan pengabdian kepada masyarakat, selain di Departemen Sosiologi dan di Fisipol UGM, saya memperoleh dukungan dan fasilitasi dari pusat studi. Saya sampaikan terima kasih kepada para pimpinan, senior, rekan dosen, asisten peneliti, dan staf administrasi dan pendukung di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM dan Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada IRE Yogyakarta, sebagai lembaga dan komunitas akademik di luar kampus di mana saya terlibat dalam aktivitas riset, pengembangan pengetahuan, dan advokasi kepada masyarakat.

Selama saya menempuh pendidikan dari tingkat dasar hingga doktoral, saya mendapatkan dukungan dari banyak sekali sahabat dan rekan, dan tiada ungkapan lain yang bisa saya sampaikan kecuali terima kasih. Dengan dukungan dan kasih sayang dari kedua orang tua dan adik-adik, saya bisa mengenyam pendidikan dan mengembangkan karier di bidang akademik. Saya sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu saya: Bapak Sukandar (alm.) yang selalu mengajarkan tentang nilai pendidikan untuk bekal laku kehidupan dan wahana mobilitas sosial dan Ibu Sumartinah yang selalu menunjukkan teladan tentang buah dari ketekunan dan kesabaran. Saya sampaikan terima kasih kepada ayah-ibu mertua: Bapak H. Daromi (alm.) dan Ibu Sunifah (almh.) yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk pengembangan karier akademik. Kepada adik-adik kandung dan ipar: Kasmanto & Diah, Tia & Hasto, Tanti & Yuyun; kakak ipar: Mbak Tutik & Mas Jurban (alm.), DheSin & Mbak Ida; dan semua keponakan, terima kasih atas suasana kebersamaannya. Kepada para perempuan yang paling dekat dalam hidup saya: istri saya, Ami, dan anak-anak saya: Naura, Hanin, dan Kei, terima kasih tak terhingga atas semua doa, pengorbanan, dan dukungan untuk menggapai mimpi, harapan, dan cita-cita dalam karier akademik saya. Terakhir, terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri pidato pengukuhan Guru Besar saya, baik secara daring maupun luring. Semoga Allah Swt., membalas semua kebaikan Ibu/Bapak sekalian.

Terima kasih.

Was-salamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera, Om shanti shanti shanti Om, Namo buddhaya, Salam kebajikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. & F. Itriwati. 2021. “Kaum Miskin Kota dan Pengalaman Kewargaan: Studi Interseksionalitas Komunitas Pinggiran Sungai Gajah Wong di Masa Pandemi”. Dalam *Pandemi, Konflik dan Transformasi: Tantangan Demokrasi dan Inklusi Sosial*, diedit oleh L. Hakim, F.A. Djalong, & M. Mas’oed. Yogyakarta: UGM Press.
- Asrawijaya, E. & B. Hidayana. 2021. “The Power of a Leader in the Samin People’s Opposition Movement to the Development of a Cement Factory in the North Kendeng Mountains”. *Humaniora*, Vol. 33, No. 1, hlm. 26–38.
- Bauman, Z. 2006. *Liquid Fear*. Amerika Serikat: John Wiley & Sons.
- Beck, U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage Publication.
- Beck, U. 1995. *Ecological Politics in an Age of Risk*. Cambridge: Polity Press.
- Beck, U. & E. Beck-Gernsheim. 2002. *Individualization: Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences*. London: Sage Publication.
- Beck, U. 2009. *World at Risk*. Cambridge: Polity Press.
- Béné, C., R.G. Wood, A. Newsham, & M. Davies. 2012. “Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of the Concept of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Programmes”. *IDS Working Papers*, No. 405.
- Berenschot, W. & G. Van Klinken (Eds.). 2019. *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Bullard, R.D. (Ed.). 1993. *Confronting environmental racism: Voices from the Grassroots*. Boston: South End Press.

- Candraningrum, D. 2014. “Politik Rahim Perempuan Kendeng Menolak Tambang Semen”. *Jurnal Perempuan*. <https://www.jurnalperempuan.org/blog/archives/09-2014>.
- Chambers, R. 2006. “Vulnerability, Coping and Policy (Editorial Introduction)”. *IDS Bulletin*, No. 37, hlm. 33–40.
- Chandler, D. 2017. “Securing the Anthropocene? International policy experiments in digital hacktivism: A case study of Jakarta”. *Security Dialogue*, Vol. 48, No. 2, hlm. 113–130.
- Colven, E. 2020. “Subterranean infrastructures in a sinking city: the politics of visibility in Jakarta”. *Critical Asian Studies*, Vol. 52, No. 3, hlm. 311–331.
- Crutzen, P.J. & E.F. Stoermer. 2013. “The ‘Anthropocene’”. Dalam *The Future of: Documents of Global Change Nature*, diedit oleh L. Robin, S. Sörlin, & P. Warde. New Haven: Yale University Press.
- Ewald, F. 1991. “Insurance and risks”. Dalam *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, diedit oleh G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller. London: Harvester Wheatsheaf.
- Faruk, Suharko, S. Retnowati, Z. Ikawati, & A. Supriyanto. 2021. Kerentanan dan Ketahanan Multidimensional: Refleksi UGM atas Pandemi Covid-19. Pidato Ilmiah Dies Natalis ke-72 UGM, 20 Desember 2021.
- Firman, T., I.M. Surbakti, I.C. Idroes, & H.A. Simarmata. 2011. “Potential climate-change related vulnerabilities in Jakarta: Challenges and current status”. *Habitat International*, Vol. 35, No. 2, hlm. 372–378.
- Foster, J.B. & I. Suwandi. 2020. “COVID-19 and catastrophe capitalism: Commodity chains and ecological-epidemiological-economic crises”. Dalam *Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism*, diedit oleh J.B. Foster & I. Suwandi. New York: Routledge.
- Foucault, M. 1991. “Governmentality”. Dalam *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, diedit oleh G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller. London: Harvester Wheatsheaf.

- Garland, D. 2003. "The rise of risk". Dalam *Risk and Morality*, diedit oleh R.V. Ericson & A. Doyle. Toronto: University of Toronto Press.
- Giddens, A. 2009. *Politics of climate change*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. 2002. *Runaway World, How Globalisation is Reshaping our Live* (2nd). London: Profile Books.
- Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Guest, P. 2019. "The impossible fight to save Jakarta, the sinking megacity". <https://www.wired.co.uk/article/jakarta-sinking>
- Hoff, M.D. & J.G. McNutt. 2009. "Social Policy and Physical Environment". Dalam *The Handbook of Social Policy* (2nd edition), diedit oleh J. Midgley & M. Livermore. London: Sage Publications, Inc.
- Hudayana, B., Suharko, & A.B. Widyanta. 2020. "Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia". *The Extractive Industries and Society*, Vol. 7, No. 4, hlm. 1547–1556.
- Jobin, P., M.S. Ho, & H.H.M. Hsiao. 2021. *Environmental Movements and Politics of the Asian Anthropocene*. Singapore: ISEAS.
- Kadetz, P. & N.B. Mock. 2018. "Problematizing Vulnerability: Unpacking gender, Intersectionality, and the normative disaster paradigm". Dalam *Creating Katrina, Rebuilding Resilience: Lessons from New Orleans on Vulnerability and Resiliency*, diedit Zakour, Mock, & Kadetz. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Kusuma, W. 2021. "LBH Yogyakarta nilai IPL Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Cacat Substansi". <https://regional.kompas.com/read/2021/04/28/060000178/lbh-yogyakarta-nilai-ipl-pembangunan-bendungan-bener-purworejo-cacat?page=all>
- Lidskog, R. & Sundqvist. 2013. "Sociology of Risk". Dalam *Essentials of Risk Theory*, diedit oleh S. Roeser, R. Hillerbrand, P. Sandin, & M. Peterson. German: Springer Science & Business Media.

- Lidskog, R., L. Soneryd, & Y. Ugglå. 2005. "Knowledge, power and control: studying environmental regulation in late modernity". *Journal of Environmental Policy and Planning*, Vol. 7, No. 2, hlm. 89–106.
- Luhmann, N., R. Barrell, N. Stehr, & G. Bechmann. 2002. *Risk: a Sociological Theory*. Boca Raton: Routledge.
- Nuswantoro. 2018. "Warga Wadas Tolak pengerukan bukit untuk proyek Bendungan Bener". <https://www.mongabay.co.id/2018/04/23/warga-wadas-tolak-pengerukan-bukit-untuk-proyek-bendungan-bener/>
- Martinez-Alier, J. 2014. "The Environmentalism of the Poor". *Geoforum*, Vol. 54, hlm. 239–241.
- Meyer, L.H. (Ed.). 2016. *Intergenerational Justice*. London: Routledge.
- Misztal, B. 2011. *The Challenges of Vulnerability: in Search of Strategies for a less Vulnerable Social Life*. New York: Palgrave Macmillan.
- Paton, D. & S. Sagala (Eds.). 2018. *Disaster Risk Reduction in Indonesia: Environmental, Social and Cultural Aspects*. United States: Charles C Thomas Publisher.
- Olofsson, A., S. Öhman, & K.G. Nygren. 2016. "An intersectional risk approach for environmental sociology". *Environmental Sociology*, Vol. 2, No. 4, hlm. 346–354.
- Rachman, N.F. & D. Yanuarydy. 2014. *MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. Bogor: Sajogyo Institute.
- Roeser, S., R. Hillerbrand, P. Sandin, & M. Peterson (Eds.). 2012. *Handbook of Risk Theory: Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk*. German: Springer Science & Business Media.
- Rosalina, M.P, A. Krisna, & S.P. Wisanggeni. 2021. "Kota-kota yang Terendam di masa depan". *Kompas* (cetak), 20 Agustus 2021.

- Samuels, G. M. & F. Ross-Sheriff. 2008. "Identity, oppression, and power: Feminisms and intersectionality theory". *Affilia*, Vol. 23, No. 1, hlm. 5–9.
- Schlosberg, D. 2004. "Reconceiving Environmental Justice: Global Movements and Political Theories". *Environmental Politics*, Vol. 13, No. 3, hlm. 517–518.
- Schlosberg, D. & L.B. Collins. 2014. "From environmental to climate justice: climate change and the discourse of environmental justice". *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, Vol. 5, No. 3, hlm. 359–374.
- Sikor, T & P. Newel. 2014. "Editorial". *Geoforum*, Vol. 54, hlm. 151–157.
- Suharko, S., 2020. "Urban environmental justice movements in Yogyakarta, Indonesia". *Environmental Sociology*, Vol. 6, No. 3, hlm. 231–241.
- Suharko, S. 2016. "Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20, No. 2, hlm. 97–116.
- UNDP. 2014. *Environmental Justice: Comparative Experiences in Legal Empowerment*. New York: UNDP.
- UNEP. 2016. "Frontiers 2016: Emerging Issues of Environmental Concern". <https://www.unep.org/resources/emerging-zoonotic-diseases-and-links-ecosystem-health-unep-frontiers-2016-chapter>
- Tremmel, J.C. 2009. *A Theory of Intergenerational Justice*. London: Routledge.
- Walhi. 2021. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2021: Negara Gagal Atasi Krisis*. https://www.walhi.or.id/uploads/buku/TLH_2021_edited_2.pdf
- Walhi. 2020. *Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi, Menuai Krisis Multidimensi*. <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/PDF%20Outlook%202020.pdf>

- Watchdoc. 2020. “Tenggelam dalam Diam” (film dokumenter).
<https://www.youtube.com/watch?v=v6hp3i2ydrI>
- Watchdoc. 2021. “Wadas Waras” (film dokumenter).
<https://www.youtube.com/watch?v=7ymbC--W-tk>
- Watts, M.J. & H.G. Bohle. 1993. “The Space of Vulnerability: the Causal Structure of Hunger and Famine”. *Progress in Human Geography*, Vol. 17, hlm. 43–67.
<https://doi.org/10.1177/030913259301700103>.
- WEF. 2021. *Global Risks Report 2021, 16th Edition*.
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
- Zinn, J.O. 2020. ‘A monstrous threat’: how a state of exception turns into a ‘new normal’. *Journal of Risk Research*, Vol. 23, Isu.7–8.
- Zinn, J.O. 2006. “Recent developments in sociology of risk and uncertainty”. *Historical Social Research*, Vol. 31, No. 2, hlm. 275–286.
- Zinn, J.O. (Ed.). 2008. *Social Theories of Risk and Uncertainty: an Introduction*. Victoria: Blackwell Publishing.

BIODATA



Nama : Prof. Dr. Suharko, M.Si.
 TTL : Kulon Progo, 25 Februari 1969
 NIP : 196902251995121001

Keluarga

Istri : Siti Aminah Yuni Widayanti, S.Sos.
 Anak : Naura Nabila, S.I.P.
 Hanin Nadhifa
 Nikeisha Nahda

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Kebonrejo, Temon, Kulon Progo (1981)
 SMP : SMPN 3 Wates, Kulon Progo (1984)
 SMA : SMAN 1 Wates, Kulon Progo (1987)
 S-1 : Sosiologi, Fisipol UGM (1993)
 S-2 : Magister Sosiologi, Program Pascasarjana UGM (1998)
 S-3 : Graduate School of International Development (GSID),
 Nagoya University, Japan (2003)

Riwayat Pekerjaan

2021–sekarang : Ketua Departemen Sosiologi, Fisipol UGM
 2019–2020 : Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK)
 UGM
 2016–2020 : Ketua Program Studi Sosiologi (S-1), Fisipol UGM

- 2010–2012 Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM, Fisipol UGM
- 2004–2009 Ketua Program Pascasarjana Sosiologi, Fisipol UGM
- 2008–2018 Anggota Tim Ahli di Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM
- 2013–sekarang Peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM
- 1995–sekarang Dosen di Departemen Sosiologi, Fisipol UGM.

Publikasi Ilmiah (5 tahun terakhir)

2021. “Environmental NGOs in “Post-New Order” Indonesia: Saving the Forests Through Democracy”. *Book Chapter*, dalam *Environmental Movements and Politics of the Asian Anthropocene*, Editor oleh Paul Jobin, Ming-so Ho, & Hsin-Huang Michael Hsiao. Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
2020. “Urban environmental justice movements in Yogyakarta, Indonesia”. *Environmental Sociology*, Vol. 6 No. 3, hlm. 231–241, DOI:10.1080/23251042.2020.1778263.
2020. “Communal violence as a strategy for negotiation: Community responses to nickel mining industry in Central Sulawesi, Indonesia”. *Extractive Industries and Society*, Vol. 7, No. 4, hlm. 1547–1556. (Penulis Kedua).
2020. “Rural Women and Food Security: Diversification of Cassava-Based Foods in Gunungkidul District, Yogyakarta”. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 08. No. 02, hlm. 1–14. DOI: 10.22500/8202029845. (Bersama dengan Bambang Hudayana).
2019. “Organisasi Masyarakat Sipil dan Restorasi Sungai: Studi pada Gerakan Memungut Sehelai Sampah di Sungai Karang Mumus di Kota Samarinda”. *Sosiologi Reflektif*, Vol.14, No. 1.
2019. “Mempertahankan Budaya Pangan Lokal Berbasis Jagung: Studi Kasus di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah”. *Sodality – Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 57–64.

2018. “Institutional Conformance of Halal Certification Organisation in Halal Tourism Industry: The Cases of Indonesia and Thailand”. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, Vol. 66, No. 3. (Bersama dengan Siti Daulah K., I Made K., & Dedi Dinarto)
2016. “Masyarakat Adat versus Korporasi: [SEP]Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013–2016”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)*, Vol. 20, No. 2.